

**Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa  
Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa**

**Ivander N. Kasenda<sup>1</sup>  
Fanley Pangemanan<sup>2</sup>  
Welly Waworundeng<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi: ivanderkasenda18@gmail.com*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Kiawa 1 Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Keberhasilan Pembangunan di suatu Negara secara komprehensif tidak terlepas dari kepemimpinan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan Nasional pada hakekatnya ditentukan juga oleh pembangunan pedesaan yang dalam hal ini pedesaan merupakan landasan bagi pencapaian keberhasilan nasional. Dengan demikian titik perhatian kebijakan pemerintah di bidang pembangunan Nasional diarahkan ke pedesaan. . penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kiawa Satu sudah optimal tingkat pencapaiannya dan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan ini karena adanya factor-faktor pendukung berdasarkan indicator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, efektivitas, efisien dan terjawab atau keberhasilan pembangunan.

***Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pembangunan***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Desa merupakan satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparat pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam artian, masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga desanya sehingga bisa mandiri. Selain sebagai perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan maka aparat pemerintah desa juga berperan sebagai pelayanan masyarakat dalam dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan guna menunjang keberhasilan dari program partisipasi masyarakat dalam suatu program pemerintah yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat di fungsikan sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah program pemerintah bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dan desa juga tidak terlepas dari adanya peran serta atau partisipasi aktif anggota masyarakat, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah atau desa, karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjuk guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah atau desa yang bersangkutan. Pembangunan desa

bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Pembangunan yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu desa, karena itu pentingnya perencanaan dalam pembangunan desa juga akan mempengaruhi pada berhasil atau tidaknya pembangunan di pedesaan dilakukan. Pembangunan desa yang terencana dan terkendali sangat diperlukan agar proses pembangunan desa tersebut berhasil dan memilih output yang efektif. Pentingnya hal tersebut juga harus didukung desa oleh kabijakan pemerintah yang baik, tapi tidak cukup jika hanya kebijakan pemerintah yang baik karena sebaik apapun itu kebijakan pemerintah tetapi cukup jika hanya kebijakan pemerintah yang baik karena sebaik apapun itu kebijakan pemerintah tetapi jika para pelaksana kebijakan itu kurang mampu menjalankannya maka akan menjadi hambatan dalam proses pembangunan, Apabila kemampuan pemerintah desa tidak memadai maka proses pembangunannya cenderung mengalami kemacetan bahkan mungkin suatu kegagalan, karena itu pentingnya perencanaan dalam pembangunan desa juga akan mempengaruhi pada berhasil atau tidaknya pembangunan di pedesaan dilakukan.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan di pedesaan dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, ke depan pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan masyarakat desa yang sebenarnya. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan dapat memenuhi dan masyarakatnya tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa kedepan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan atau terencana yang dihadapi oleh desa).

Program pembangunan di Desa Kiawa Satu bertujuan untuk memajukan desa dengan sarana dan prasarana yang ada di desa., termasuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa Kiawa Satu. Pembangunan Infrastruktur Desa Kiawa Satu di Tahun 2021 masih ada yang belum terealisasi karena ada beberapa masalah yaitu adanya pandemic covid 19 yang menghambat adanya pembangunan. Terhambatnya beberapa pembangun infrastruktur Desa Kiawa Satu di Tahun 2021, karena permasalahan terbatas dana, juga menurunnya partisipasi masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan perkebunan, jembatan jalan setapak desa, dan talut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah di Desa Kiawa Satu Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa, mengenai kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori menurut Said Zainal Abidin (2004), kriteria penentuan kebijakan pemerintah ditentukan dalam proses penyaringan serangkaian kriteria sebagai berikut:

- a) Efektifitas yaitu mengukur alternative sasaran yang dicapai dengan suatu alternative kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan,
- b) Efisien yaitu dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

- c). Terjawab yaitu Kebijakan dibuat dalam memenuhi kebutuhan suatu golongan atau masalah tertentu dalam masyarakat

Informan adalah orang yang member informasi tentang data yang di inginkan peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang di laksanakan. Yang menjadi informannya adalah terdiri dari 8 orang yaitu :

1. Hukum Tua
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4. BPD
5. Tokoh Masyarakat
6. Tokoh Agama
7. Tokoh Pendidikan
8. Tokoh Pemuda

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi data
3. Penyajian Data
4. Kesimpulan

### **Pembahasan**

Penetapan arah dan tujuan Pembangunan Infrastruktur Desa Kiawa Satu melibatkan partisipasi aktif seluruh unsur, baik dari Pemerintah, Lembaga, Tokoh Masyarakat, Toko Agama serta masyarakat itu sendiri. Seluruh Komponen inilah yang akan berpartisipasi membawa Desa Kiawa Satu kearah Pembangunan yang dicita-citakan yang sesuai tujuan yang diharapkan.

Menurut RS umur 47 Tahun sebagai Sekretaris Desa Kiawa Satu mengatakan bahwa, Kebijakan Pemerintah Desa Kiawa Satu dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Desa dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Desa yang ada, dengan perkiraan pendapatan asli desa lewat punggutan desa setiap tahun sekitar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Dana ini merupakan swadaya murni masyarakat.

Untuk operasional kegiatan penyelenggaraan Pembangunan, Pemerintah Desa masih mengandalkan bantuan Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut FK umur 50 Tahun selaku Kepala Urusan Perencanaan Keuangan dan pelaporan Desa Kiawa Satu mengatakan bahwa, kebijakan Pemerintah Desa Kiawa Satu dalam pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur sepenuhnya mengacu pada kemampuan Desa Kiawa Stu

yang besarnya disesuaikan dengan keuangan Desa. Alokasi dana Desa merupakan dana stimulan, maka harus didukung dengan pendapatan asli Desa serta partisipasi /swadaya masyarakat, karena prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Kiawa Satu itu sendiri

Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam hal desa melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi melibatkan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Tahapan persiapan yang meliputi penetapan Pelaksana Kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan, pembekalan Pelaksana Kegiatan, pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material.

Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaan pembangunan Desa, Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan, penanganan pengaduan

dan penyelesaian masalah, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.

Berdasarkan data penelitian bahwa 62,5 persen dari informan menyatakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kiawa Satu terutama dimasa pandemic Covid 19 pelaksanaannya sudah maksimal, sedangkan 37,5 persen menyatakan kurang maksimal. Menurut VAP umur 55 Tahun masih kurang maksimalnya pembangun infrastruktur yang ada di Desa Kiawa Satu, karena adanya dampak covid 19, yang menghambat rencana dan pelaksanaan beberapa pembangunan. Lebih lanjut, dijelaskan oleh informan RM umur 67 Tahun, bahwa realisasi pembangunan agak terhambat, terutama di masa adanya pandemic covid 19.

#### **Kebijakan Pemerintah Desa**

Variabel peran dapat diukur dengan menggunakan indicator-indikator sebagai berikut:

##### **a. Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Desa dari indicator efektifitas menunjukkan hasil yang efektif dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kiawa Satu. Tingkat efektifitas yang tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari indicator pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan yang ada. Hasil menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam menunjang pembangunan desa ternyata sudah efektif dalam program pembangunan desa.

##### **b. Efisiensi**

Efisiensi adalah kemampuan Pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun program pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Peran pemerintah desa dilihat dari beberapa kebijakannya pemerintah desa dalam pembangunan serta pelayanan atau penyelesaian masalah terhadap masyarakat, sudah efektif, karena hasil pembangunan sudah dinikmati oleh masyarakat, yang dibuktikan oleh beberapa informan yang memberikan pernyataan yang positif.

##### **Keberhasilan pembangunan**

Keberhasilan suatu pembangunan dapat didefinisikan sebagai prestasi yang harus dicapai bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indikator lainnya adalah tingkat partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan sangat menentukan suatu keberhasilan pembangunan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dijelaskan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan yang ada di Desa Kiawa Satu sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada program yang tertunda karena terkendala dengan adanya pandemic covid 19. Tetapi sebagian besar sudah terealisasi sesuai dengan program yang ada, juga sesuai dengan usulan dan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.

## Penutup Kesimpulan

1. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kiawa Satu sudah optimal tingkat pencapaiannya dan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan ini karena adanya factor-faktor pendukung berdasarkan indicator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, efektivitas, efisien dan terjawab atau keberhasilan pembangunan.
2. Efisien dapat dilihat dari partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan Infrastruktur Desa Kiawa Satu sudah cukup maksimal, terutama dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sebagian besar masyarakat memberikan jawaban terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan atau indikator-indikator yang diajukan. Adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan masyarakat Desa Kiawa Satu sudah paham akan pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung program pembangunan Desa.
3. Terjawab masih ada program pembangunan yang realisasinya terlambat oleh karena terkendala adanya pandemic covid 19, dimana sebagian dananya dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid 19 ini.

## Saran

1. Dalam melaksanakan Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemerintah lebih memperhatikan dan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang

- menjadi skala prioritas berdasarkan usulan atau program yang ada.
2. Dalam memaksimalkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, diharapkan Pemerintah terus efektif memberikan motivasi dan lebih transparan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan.
3. Terjawab. Dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah untuk Pembangunan infrastruktur di Desa Kiawa Satu, dijalankan sesuai dengan mekanisme dan regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Daftar Pustaka

- Aminah. S, Roikan. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta : Kencana Prenamedia Group.
- Aras, Mukhamad. 2013. *Gaya kepemimpinan kepala desa*, Uiversitas Islam Indragiri, Indragiri Hilir, volume 12, Nomor 2.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Ilmu dan seni kepemimpinan*, Jakarta: Mitrawacana media.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Anwas, M Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabata.
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewantara, KH. (1967). *Ki Hadjar Dewantara*. Jogjakarta: Majelis Leluhur Taman Siswa.

- Dini Utami, Ajeng. 2019. *Buku Pintar Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Temanggung: Literasi Desa Mandiri.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Pengembangan Sumberdaya Manusia Manajemen Pelatihan Ketatanegaraan; pendekatan terpadu* Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafie. 2007. *Etika Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mulyadi dan Rivai (2009) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta cetakan kesembilan.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rachmawati, Nuraini Eka. 2004. *Paradigma Baru Manajemen SDM sebagai Basis Meraih Keunggulan Kompetitif Pertama*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Richard, Carver. 2003. *Clutterbuck. Managing Director Covardale Organization*. C Samsudin, sadili, 2009. *Manajemen Sumber Daya*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Teori & Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sobahi, K., & Suhana, C. (2011). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: CV. Cakra.
- Sunyoto danang, 2013. *Dasar-dasar Manajemen*. CAPS. Yogyakarta.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Sutikno, sobri M, 2014. *Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan*. Holistica, Lombok.
- Wukir, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Cetakan I, Multi Presindo, Yogyakarta.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternative*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Madi.
- Waworundeng welly. 2019. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompasso*. Jurnal Eksekutif. Fispol Unsrat.
- Sumber-sumber lain:*  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/88021>  
UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
[www.kompasiana.com/budaya-mapalus-di-kalangan-masyarakat-minahasa](http://www.kompasiana.com/budaya-mapalus-di-kalangan-masyarakat-minahasa).